



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 DESEMBER 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Perubahan pada rencana tahunan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berupa Pendapatan, Pengeluaran dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.146.097.932.000,00, (dua triliun seratus empat puluh enam miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	2.087.097.932.000,00
b. Belanja Daerah	Rp.	2.145.035.432.000,00
Defisit	Rp.	57.937.500.000,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.	59.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	1.062.500.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	57.937.500.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00

Pasal 4

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.2.087.097.932.000,00 (dua triliun delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.305.053.412.000,00 (tiga ratus lima miliar lima puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.237.226.000,00 (delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.146.656.562.000,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.208.643.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.950.981.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.780.873.006.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.586.688.171.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.194.184.835.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.171.514.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan hibah.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.145.035.432.000,00 (dua triliun seratus empat puluh lima miliar tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.585.077.591.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.998.793.748.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.503.210.134.000,00 (lima ratus tiga miliar dua ratus sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.76.622.154.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.451.555.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.145.330.915.000,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.66.143.196.000,00 (enam puluh enam miliar seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.37.055.908.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.329.456.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.752.355.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.412.626.926.000,00 (empat ratus dua belas miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.325.588.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.403.301.338.000,00 (empat ratus tiga miliar tiga ratus satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.57.937.500.000,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. pencairan dana cadangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah);

- (3) Pencairan dana cadangan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 15

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.062.500.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belajad daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.57.937.500.000,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.57.937.500.000,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Belanja mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;
17. Lampiran XVII Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.

Pasal 19

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Desember 2023



Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 22 Desember 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,
PROVINSI JAWA TENGAH: (14-358/2023)

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;
17. Lampiran XVII Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.

Pasal 19

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Desember 2023



Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 22 Desember 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,
PROVINSI JAWA TENGAH: (14-358/2023)



KABUPATEN PURBALINGGA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	305.053.412.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	80.237.226.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	146.656.562.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.208.643.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	55.950.981.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.780.873.006.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.586.688.171.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	194.184.835.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.171.514.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.171.514.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.087.097.932.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.585.077.591.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	998.793.748.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.210.134.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	76.622.154.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.451.555.000,00
5.2	BELANJA MODAL	145.330.915.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.143.196.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.055.908.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.329.456.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.752.355.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	412.626.926.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.325.588.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	403.301.338.000,00
	Jumlah Belanja	2.145.035.432.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-57.937.500.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	6.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.062.500.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.062.500.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.062.500.000,00
	Pembiayaan Netto	57.937.500.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00


 BUPATI PURBALINGGA
 AYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 Pada tanggal 22 Desember 2023
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA


 HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROPINSI JAWA TENGAH (14-358/2023)



KABUPATEN PURBALINGGA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	187.739.145.000,00	1.165.127.919.000,00	135.305.931.000,00	0,00	0,00	1.300.433.850.000,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	720.554.977.000,00	77.152.702.000,00	0,00	0,00	797.707.679.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	692.269.396.000,00	69.411.783.000,00	0,00	0,00	761.681.179.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0001	TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA	0,00	122.051.000,00	33.149.000,00	0,00	0,00	155.200.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0002	TK NEGERI PEMBINA BOBOTSARI	0,00	82.021.000,00	46.779.000,00	0,00	0,00	128.800.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0003	TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI	0,00	86.326.000,00	46.674.000,00	0,00	0,00	133.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0004	TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA	0,00	77.303.000,00	52.097.000,00	0,00	0,00	129.400.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0020	SMP NEGERI 1 PURBALINGGA	0,00	856.860.000,00	123.040.000,00	0,00	0,00	979.900.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0021	SMP NEGERI 2 PURBALINGGA	0,00	794.215.000,00	104.285.000,00	0,00	0,00	898.500.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0022	SMP NEGERI 3 PURBALINGGA	0,00	792.100.000,00	78.900.000,00	0,00	0,00	871.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0023	SMP NEGERI 4 PURBALINGGA	0,00	620.782.000,00	231.518.000,00	0,00	0,00	852.300.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0024	SMP NEGERI 5 PURBALINGGA	0,00	748.498.000,00	168.702.000,00	0,00	0,00	917.200.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0025	SMP NEGERI 1 KALIMANAH	0,00	811.038.000,00	161.162.000,00	0,00	0,00	972.200.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0026	SMP NEGERI 2 KALIMANAH	0,00	703.655.000,00	203.645.000,00	0,00	0,00	907.300.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0027	SMP NEGERI 3 KALIMANAH	0,00	360.023.000,00	139.877.000,00	0,00	0,00	499.900.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0028	SMP NEGERI 1 PADAMARA	0,00	634.134.000,00	233.566.000,00	0,00	0,00	867.700.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0029	SMP NEGERI 2 PADAMARA	0,00	349.075.000,00	356.925.000,00	0,00	0,00	706.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0030	SMP NEGERI 1 KUTASARI	0,00	700.254.000,00	192.746.000,00	0,00	0,00	893.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0031	SMP NEGERI 2 KUTASARI	0,00	556.652.000,00	139.448.000,00	0,00	0,00	696.100.000,00



KABUPATEN PURBALINGGA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	187.739.145.000,00	1.165.127.919.000,00	135.305.931.000,00	0,00	0,00	1.300.433.850.000,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	720.554.977.000,00	77.152.702.000,00	0,00	0,00	797.707.679.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	692.269.396.000,00	69.411.783.000,00	0,00	0,00	761.681.179.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0001	TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA	0,00	122.051.000,00	33.149.000,00	0,00	0,00	155.200.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0002	TK NEGERI PEMBINA BOBOTSARI	0,00	82.021.000,00	46.779.000,00	0,00	0,00	128.800.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0003	TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI	0,00	86.326.000,00	46.674.000,00	0,00	0,00	133.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0004	TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA	0,00	77.303.000,00	52.097.000,00	0,00	0,00	129.400.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0020	SMP NEGERI 1 PURBALINGGA	0,00	856.860.000,00	123.040.000,00	0,00	0,00	979.900.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0021	SMP NEGERI 2 PURBALINGGA	0,00	794.215.000,00	104.285.000,00	0,00	0,00	898.500.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0022	SMP NEGERI 3 PURBALINGGA	0,00	792.100.000,00	78.900.000,00	0,00	0,00	871.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0023	SMP NEGERI 4 PURBALINGGA	0,00	620.782.000,00	231.518.000,00	0,00	0,00	852.300.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0024	SMP NEGERI 5 PURBALINGGA	0,00	748.498.000,00	168.702.000,00	0,00	0,00	917.200.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0025	SMP NEGERI 1 KALIMANAH	0,00	811.038.000,00	161.162.000,00	0,00	0,00	972.200.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0026	SMP NEGERI 2 KALIMANAH	0,00	703.655.000,00	203.645.000,00	0,00	0,00	907.300.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0027	SMP NEGERI 3 KALIMANAH	0,00	360.023.000,00	139.877.000,00	0,00	0,00	499.900.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0028	SMP NEGERI 1 PADAMARA	0,00	634.134.000,00	233.566.000,00	0,00	0,00	867.700.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0029	SMP NEGERI 2 PADAMARA	0,00	349.075.000,00	356.925.000,00	0,00	0,00	706.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0030	SMP NEGERI 1 KUTASARI	0,00	700.254.000,00	192.746.000,00	0,00	0,00	893.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0031	SMP NEGERI 2 KUTASARI	0,00	556.652.000,00	139.448.000,00	0,00	0,00	696.100.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0032	SMP NEGERI 3 KUTASARI	0,00	308.836.000,00	165.764.000,00	0,00	0,00	474.600.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0033	SMP NEGERI 4 KUTASARI	0,00	568.193.000,00	164.207.000,00	0,00	0,00	732.400.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0034	SMP NEGERI 1 KARANGREJA	0,00	563.548.000,00	119.352.000,00	0,00	0,00	682.900.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0035	SMP NEGERI 2 KARANGREJA	0,00	404.907.000,00	190.693.000,00	0,00	0,00	595.600.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0036	SMP NEGERI 3 KARANGREJA	0,00	370.687.000,00	119.313.000,00	0,00	0,00	490.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0037	SMP NEGERI 1 KARANGJAMBU	0,00	302.012.000,00	119.788.000,00	0,00	0,00	421.800.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0038	SMP NEGERI 2 KARANGJAMBU	0,00	173.740.000,00	48.060.000,00	0,00	0,00	221.800.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0039	SMP NEGERI 1 KEMANGKON	0,00	656.744.000,00	203.256.000,00	0,00	0,00	860.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0040	SMP NEGERI 2 KEMANGKON	0,00	312.875.000,00	161.925.000,00	0,00	0,00	474.800.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0041	SMP NEGERI 3 KEMANGKON	0,00	272.639.000,00	76.761.000,00	0,00	0,00	349.400.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0042	SMP NEGERI 4 KEMANGKON	0,00	296.453.000,00	62.847.000,00	0,00	0,00	359.300.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0043	SMP NEGERI 1 BUKATEJA	0,00	757.683.000,00	161.717.000,00	0,00	0,00	919.400.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0044	SMP NEGERI 2 BUKATEJA	0,00	753.750.000,00	164.550.000,00	0,00	0,00	918.300.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0045	SMP NEGERI 3 BUKATEJA	0,00	570.813.000,00	151.687.000,00	0,00	0,00	722.500.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0046	SMP NEGERI 1 KEJOBONG	0,00	616.286.000,00	165.614.000,00	0,00	0,00	781.900.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0047	SMP NEGERI 2 KEJOBONG	0,00	310.301.000,00	88.399.000,00	0,00	0,00	398.700.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0048	SMP NEGERI 1 KALIGONDANG	0,00	718.829.000,00	254.471.000,00	0,00	0,00	973.300.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0049	SMP NEGERI 2 KALIGONDANG	0,00	429.710.000,00	169.190.000,00	0,00	0,00	598.900.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0050	SMP NEGERI 1 PENGADEGAN	0,00	645.501.000,00	137.499.000,00	0,00	0,00	783.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0051	SMP NEGERI 2 PENGADEGAN	0,00	393.901.000,00	71.899.000,00	0,00	0,00	465.800.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0052	SMP NEGERI 3 PENGADEGAN	0,00	309.000.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	371.400.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0053	SMP NEGERI 1 REMBANG	0,00	726.185.000,00	134.915.000,00	0,00	0,00	861.100.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0054	SMP NEGERI 2 REMBANG	0,00	521.686.000,00	155.714.000,00	0,00	0,00	677.400.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0055	SMP NEGERI 4 REMBANG	0,00	269.290.000,00	27.310.000,00	0,00	0,00	296.600.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0056	SMP NEGERI 1 KARANGMONCOL	0,00	786.080.000,00	123.420.000,00	0,00	0,00	909.500.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0057	SMP NEGERI 2 KARANGMONCOL	0,00	259.398.000,00	97.702.000,00	0,00	0,00	357.100.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0058	SMP NEGERI 3 KARANGMONCOL	0,00	184.132.000,00	35.468.000,00	0,00	0,00	219.600.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0059	SMP NEGERI 4 KARANGMONCOL	0,00	273.619.000,00	59.281.000,00	0,00	0,00	332.900.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0060	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	0,00	672.174.000,00	188.926.000,00	0,00	0,00	861.100.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0061	SMP NEGERI 1 KERTANEGARA	0,00	517.598.000,00	152.102.000,00	0,00	0,00	669.700.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0062	SMP NEGERI 2 KERTANEGARA	0,00	298.712.000,00	93.388.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0063	SMP NEGERI 1 BOJONGSARI	0,00	699.067.000,00	267.633.000,00	0,00	0,00	966.700.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0064	SMP NEGERI 2 BOJONGSARI	0,00	700.060.000,00	130.240.000,00	0,00	0,00	830.300.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0065	SMP NEGERI 1 MREBET	0,00	661.871.000,00	199.229.000,00	0,00	0,00	861.100.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0066	SMP NEGERI 2 MREBET	0,00	513.618.000,00	160.482.000,00	0,00	0,00	674.100.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0067	SMP NEGERI 3 MREBET	0,00	368.862.000,00	84.838.000,00	0,00	0,00	453.700.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0068	SMP NEGERI 4 MREBET	0,00	339.131.000,00	51.869.000,00	0,00	0,00	391.000.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0069	SMP NEGERI 5 MREBET	0,00	360.410.000,00	133.990.000,00	0,00	0,00	494.400.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0070	SMP NEGERI 1 BOBOTSARI	0,00	718.848.000,00	155.452.000,00	0,00	0,00	874.300.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0071	SMP NEGERI 2 BOBOTSARI	0,00	668.478.000,00	129.922.000,00	0,00	0,00	798.400.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0072	SMP NEGERI 3 BOBOTSARI	0,00	448.239.000,00	101.161.000,00	0,00	0,00	549.400.000,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0073	SMP NEGERI 4 BOBOTSARI	0,00	266.728.000,00	85.972.000,00	0,00	0,00	352.700.000,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	185.188.899.000,00	364.024.595.000,00	19.776.123.000,00	0,00	0,00	383.800.718.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	0,00	159.842.258.000,00	2.548.024.000,00	0,00	0,00	162.390.282.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD LABKES	900.000.000,00	872.740.000,00	27.260.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS PURBALINGGA	1.900.000.000,00	3.170.004.000,00	8.668.000,00	0,00	0,00	3.178.672.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS BOJONG	900.000.000,00	1.721.240.000,00	56.958.000,00	0,00	0,00	1.778.198.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS KUTASARI	4.032.790.000,00	5.166.514.000,00	86.200.000,00	0,00	0,00	5.252.714.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS BOJONGSARI	3.180.000.000,00	4.327.029.000,00	28.196.000,00	0,00	0,00	4.355.225.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	PUSKESMAS KALIMANAH	2.371.600.000,00	3.747.132.000,00	99.835.000,00	0,00	0,00	3.846.967.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS PADAMARA	2.580.840.000,00	3.774.049.000,00	20.620.000,00	0,00	0,00	3.794.669.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	PUSKESMAS KEMANGKON	3.724.860.000,00	4.718.196.000,00	94.950.000,00	0,00	0,00	4.813.146.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	PUSKESMAS KALIGONDANG	2.532.000.000,00	3.513.942.000,00	66.020.000,00	0,00	0,00	3.579.962.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	PUSKESMAS KALIKAJAR	1.153.200.000,00	2.170.260.000,00	57.640.000,00	0,00	0,00	2.227.900.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	PUSKESMAS KEJOBONG	3.445.321.000,00	4.112.485.000,00	277.500.000,00	0,00	0,00	4.389.985.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	PUSKESMAS PENGADEGAN	2.618.354.000,00	3.495.328.000,00	50.070.000,00	0,00	0,00	3.545.398.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	PUSKESMAS BUKATEJA	3.062.800.000,00	3.809.368.000,00	33.920.000,00	0,00	0,00	3.843.288.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	PUSKESMAS KUTAWIS	1.890.947.000,00	2.814.890.000,00	37.680.000,00	0,00	0,00	2.852.570.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	PUSKESMAS REMBANG	4.800.000.000,00	5.716.599.000,00	314.650.000,00	0,00	0,00	6.031.249.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	PUSKESMAS KARANGANYAR	3.553.194.000,00	4.090.959.000,00	297.281.000,00	0,00	0,00	4.388.240.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	PUSKESMAS KARANGMONCOL	3.700.000.000,00	4.607.079.000,00	128.100.000,00	0,00	0,00	4.735.179.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	PUSKESMAS KARANGTENGAH	2.139.690.000,00	2.922.038.000,00	65.800.000,00	0,00	0,00	2.987.838.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0027	PUSKESMAS BOBOTSARI	3.932.854.000,00	4.868.669.000,00	43.537.000,00	0,00	0,00	4.912.206.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0028	PUSKESMAS MREBET	2.421.878.000,00	3.229.258.000,00	95.490.000,00	0,00	0,00	3.324.748.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0029	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN	2.684.483.000,00	3.617.309.000,00	186.448.000,00	0,00	0,00	3.803.757.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0030	PUSKESMAS KARANGREJA	3.900.400.000,00	4.653.472.000,00	89.460.000,00	0,00	0,00	4.742.932.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0031	PUSKESMAS KARANGJAMBU	1.898.688.000,00	2.697.087.000,00	43.170.000,00	0,00	0,00	2.740.257.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0101	RSUD GOETENG TAROENADIBRATA	95.865.000.000,00	95.489.003.000,00	10.896.333.000,00	0,00	0,00	106.385.336.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0102	RSUD PANTI NUGROHO	26.000.000.000,00	24.877.687.000,00	4.122.313.000,00	0,00	0,00	29.000.000.000,00

Kode		Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja					
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.369.000.000,00	46.148.845.000,00	38.336.756.000,00	0,00	0,00	84.485.601.000,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.369.000.000,00	19.658.937.000,00	38.336.756.000,00	0,00	0,00	57.995.693.000,00
1	03	1.04.1.03.2.10.02.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	0,00	26.489.908.000,00	0,00	0,00	0,00	26.489.908.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.181.246.000,00	7.010.987.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	7.012.277.000,00
1	04	1.04.1.03.2.10.02.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.181.246.000,00	7.010.987.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	7.012.277.000,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	11.798.569.000,00	7.060.000,00	0,00	0,00	11.805.629.000,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	8.198.370.000,00	0,00	0,00	0,00	8.198.370.000,00
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	3.600.199.000,00	7.060.000,00	0,00	0,00	3.607.259.000,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	15.589.946.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	15.621.946.000,00
1	06	1.06.2.14.2.08.06.0000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	15.589.946.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	15.621.946.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.328.602.000,00	113.974.876.000,00	6.914.294.000,00	0,00	0,00	120.889.170.000,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	190.000.000,00	6.201.925.000,00	0,00	0,00	0,00	6.201.925.000,00
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA	190.000.000,00	6.201.925.000,00	0,00	0,00	0,00	6.201.925.000,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	768.479.000,00	0,00	0,00	0,00	768.479.000,00
2	08	1.06.2.14.2.08.06.0000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	768.479.000,00	0,00	0,00	0,00	768.479.000,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	205.000.000,00	5.680.216.000,00	0,00	0,00	0,00	5.680.216.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	09	2.09.3.25.0.00.02.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	205.000.000,00	5.680.216.000,00	0,00	0,00	0,00	5.680.216.000,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	249.494.000,00	0,00	0,00	0,00	249.494.000,00
2	10	1.04.1.03.2.10.02.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	0,00	249.494.000,00	0,00	0,00	0,00	249.494.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	826.875.000,00	16.857.373.000,00	20.060.000,00	0,00	0,00	16.877.433.000,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	826.875.000,00	16.857.373.000,00	20.060.000,00	0,00	0,00	16.877.433.000,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	6.349.004.000,00	236.000.000,00	0,00	0,00	6.585.004.000,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	6.349.004.000,00	236.000.000,00	0,00	0,00	6.585.004.000,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	8.401.187.000,00	0,00	0,00	0,00	8.401.187.000,00
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	8.401.187.000,00	0,00	0,00	0,00	8.401.187.000,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	10.440.201.000,00	2.641.478.000,00	0,00	0,00	13.081.679.000,00
2	14	1.06.2.14.2.08.06.0000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	10.440.201.000,00	2.641.478.000,00	0,00	0,00	13.081.679.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.800.000.000,00	20.569.844.000,00	2.238.080.000,00	0,00	0,00	22.807.924.000,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	1.800.000.000,00	20.569.844.000,00	2.238.080.000,00	0,00	0,00	22.807.924.000,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	7.683.763.000,00	508.060.000,00	0,00	0,00	8.191.823.000,00
2	16	2.16.2.20.2.21.03.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	7.683.763.000,00	508.060.000,00	0,00	0,00	8.191.823.000,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	9.514.701.000,00	0,00	0,00	0,00	9.514.701.000,00
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	9.514.701.000,00	0,00	0,00	0,00	9.514.701.000,00

Kode			Usuran Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	4.420.659.000,00	52.332.000,00	0,00	0,00	4.472.991.000,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	4.420.659.000,00	52.332.000,00	0,00	0,00	4.472.991.000,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	306.727.000,00	9.976.334.000,00	1.198.284.000,00	0,00	0,00	11.174.618.000,00
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	306.727.000,00	9.976.334.000,00	1.198.284.000,00	0,00	0,00	11.174.618.000,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	39.568.000,00	0,00	0,00	0,00	39.568.000,00
2	20	2.16.2.20.2.21.03.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	39.568.000,00	0,00	0,00	0,00	39.568.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	49.148.000,00	0,00	0,00	0,00	49.148.000,00
2	21	2.16.2.20.2.21.03.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	49.148.000,00	0,00	0,00	0,00	49.148.000,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	2.500.043.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.043.000,00
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	2.500.043.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.043.000,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	183.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	203.000.000,00
2	23	2.24.2.23.0.00.02.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	183.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	203.000.000,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	4.089.937.000,00	0,00	0,00	0,00	4.089.937.000,00
2	24	2.24.2.23.0.00.02.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	4.089.937.000,00	0,00	0,00	0,00	4.089.937.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7.129.629.000,00	57.257.017.000,00	1.912.263.000,00	0,00	0,00	59.169.280.000,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	583.869.000,00	202.340.000,00	0,00	0,00	786.209.000,00
3	25	2.09.3.25.0.00.02.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	0,00	583.869.000,00	202.340.000,00	0,00	0,00	786.209.000,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	459.325.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	483.625.000,00
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0,00	459.325.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	483.625.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	589.629.000,00	42.407.065.000,00	1.379.777.000,00	0,00	0,00	43.786.842.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	589.629.000,00	42.407.065.000,00	1.379.777.000,00	0,00	0,00	43.786.842.000,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	4.475.815.000,00	301.139.000,00	0,00	0,00	4.776.954.000,00
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	4.475.815.000,00	301.139.000,00	0,00	0,00	4.776.954.000,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	6.540.000.000,00	9.319.743.000,00	4.707.000,00	0,00	0,00	9.324.450.000,00
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.540.000.000,00	9.319.743.000,00	4.707.000,00	0,00	0,00	9.324.450.000,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
3	32	2.07.3.32.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA	0,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	113.174.991.000,00	983.145.000,00	0,00	0,00	114.158.136.000,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	57.036.053.000,00	351.145.000,00	0,00	0,00	57.387.198.000,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	19.384.494.000,00	0,00	0,00	0,00	19.384.494.000,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN UMUM	0,00	16.020.513.000,00	115.620.000,00	0,00	0,00	16.136.133.000,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN ORGANISASI	0,00	292.860.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	392.860.000,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	BAGIAN HUKUM	0,00	412.421.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	459.421.000,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN PEMERINTAHAN	0,00	605.370.000,00	0,00	0,00	0,00	605.370.000,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	0,00	44.811.000,00	0,00	0,00	0,00	44.811.000,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	0,00	575.901.000,00	0,00	0,00	0,00	575.901.000,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	18.222.766.000,00	0,00	0,00	0,00	18.222.766.000,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0,00	245.834.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	260.834.000,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	460.323.000,00	0,00	0,00	0,00	460.323.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	12.320.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	32.320.000,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0011	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0,00	493.320.000,00	53.525.000,00	0,00	0,00	546.845.000,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0011	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0,00	265.120.000,00	0,00	0,00	0,00	265.120.000,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	56.138.938.000,00	632.000.000,00	0,00	0,00	56.770.938.000,00
4	02	4.02.0.00.0.00.02.0000	SEKRETARIAT DPRD	0,00	56.138.938.000,00	632.000.000,00	0,00	0,00	56.770.938.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.888.900.556,00	37.523.427.000,00	21.252.000,00	2.000.000.000,00	412.626.926.000,00	452.171.605.000,00
5	01		PERENCANAAN	0,00	12.679.563.000,00	0,00	0,00	0,00	12.679.563.000,00
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	12.679.563.000,00	0,00	0,00	0,00	12.679.563.000,00
5	02		KEUANGAN	1.888.900.556,00	16.813.168.000,00	21.252.000,00	2.000.000.000,00	412.626.926.000,00	431.461.346.000,00
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.888.900.556,00	16.813.168.000,00	21.252.000,00	2.000.000.000,00	412.626.926.000,00	431.461.346.000,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	6.954.648.000,00	0,00	0,00	0,00	6.954.648.000,00
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	6.954.648.000,00	0,00	0,00	0,00	6.954.648.000,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	1.021.048.000,00	0,00	0,00	0,00	1.021.048.000,00
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	1.021.048.000,00	0,00	0,00	0,00	1.021.048.000,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	8.515.593.000,00	0,00	0,00	0,00	8.515.593.000,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	8.515.593.000,00	0,00	0,00	0,00	8.515.593.000,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	8.515.593.000,00	0,00	0,00	0,00	8.515.593.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	51.853.638.000,00	194.030.000,00	0,00	0,00	52.047.668.000,00
7	01		KECAMATAN	0,00	51.853.638.000,00	194.030.000,00	0,00	0,00	52.047.668.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN KEMANGKON	0,00	1.635.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.635.460.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN BUKATEJA	0,00	1.735.287.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	1.810.287.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN KEJOBONG	0,00	1.802.641.000,00	0,00	0,00	0,00	1.802.641.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN KALIGONDANG	0,00	2.158.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.158.170.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN PURBALINGGA	0,00	10.423.590.000,00	0,00	0,00	0,00	10.423.590.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0001	KELURAHAN BOJONG	0,00	536.508.000,00	0,00	0,00	0,00	536.508.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0002	KELURAHAN KEDUNGMENJANGAN	0,00	389.044.000,00	0,00	0,00	0,00	389.044.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0003	KELURAHAN BANCAR	0,00	392.514.000,00	0,00	0,00	0,00	392.514.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0004	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN	0,00	395.664.000,00	0,00	0,00	0,00	395.664.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0005	KELURAHAN PURBALINGGA KULON	0,00	413.484.000,00	0,00	0,00	0,00	413.484.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0006	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL	0,00	415.686.000,00	0,00	0,00	0,00	415.686.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0007	KELURAHAN PURBALINGGA LOR	0,00	397.550.000,00	0,00	0,00	0,00	397.550.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0008	KELURAHAN PENAMBONGAN	0,00	422.363.000,00	0,00	0,00	0,00	422.363.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0009	KELURAHAN KANDANGGAMPANG	0,00	396.939.000,00	0,00	0,00	0,00	396.939.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0010	KELURAHAN KEMBARAN KULON	0,00	402.434.000,00	0,00	0,00	0,00	402.434.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0011	KELURAHAN WIRASANA	0,00	404.476.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	408.506.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KALIMANAH	0,00	3.964.923.000,00	0,00	0,00	0,00	3.964.923.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0001	KELURAHAN MEWEK	0,00	408.181.000,00	0,00	0,00	0,00	408.181.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0002	KELURAHAN KARANGMANYAR	0,00	395.644.000,00	0,00	0,00	0,00	395.644.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0003	KELURAHAN KALIKABONG	0,00	389.452.000,00	0,00	0,00	0,00	389.452.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN KUTASARI	0,00	1.937.433.000,00	0,00	0,00	0,00	1.937.433.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN MREBET	0,00	2.122.352.000,00	0,00	0,00	0,00	2.122.352.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN BOBOTSARI	0,00	1.799.061.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	1.874.061.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN KARANGREJA	0,00	1.917.472.000,00	0,00	0,00	0,00	1.917.472.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN KARANGANYAR	0,00	1.747.249.000,00	0,00	0,00	0,00	1.747.249.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN KARANGMONCOL	0,00	1.930.423.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.423.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN REMBANG	0,00	2.053.773.000,00	0,00	0,00	0,00	2.053.773.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN BOJONGSARI	0,00	1.964.923.000,00	0,00	0,00	0,00	1.964.923.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN PADAMARA	0,00	2.688.430.000,00	0,00	0,00	0,00	2.688.430.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.15.1501	KELURAHAN KARANGSENTUL	0,00	460.232.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	500.232.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN PENGADEGAN	0,00	2.214.354.000,00	0,00	0,00	0,00	2.214.354.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN KARANGJAMBU	0,00	1.846.201.000,00	0,00	0,00	0,00	1.846.201.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN KERTANEGARA	0,00	1.691.725.000,00	0,00	0,00	0,00	1.691.725.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	37.650.130.000,00	0,00	0,00	0,00	37.650.130.000,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	37.650.130.000,00	0,00	0,00	0,00	37.650.130.000,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	37.650.130.000,00	0,00	0,00	0,00	37.650.130.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0074	SMP NEGERI 3 SATU ATAP KARANGJAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0075	SMP NEGERI 3 SATU ATAP REMBANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0076	SMP NEGERI 4 SATU ATAP KARANGJAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0077	SMP NEGERI 5 SATU ATAP KARANGMONCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	459.325.000	24.300.000	-	-	483.625.000
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	589.629.000	42.407.065.000	1.379.777.000	-	-	43.786.842.000
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	589.629.000	42.407.065.000	1.379.777.000	-	-	43.786.842.000
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	-	4.475.815.000	301.139.000	-	-	4.776.954.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	4.475.815.000	301.139.000	-	-	4.776.954.000
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	6.540.000.000	9.319.743.000	4.707.000	-	-	9.324.450.000
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.540.000.000	9.319.743.000	4.707.000	-	-	9.324.450.000
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	11.200.000	-	-	-	11.200.000
3	32	2.07.3.32.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA	-	11.200.000	-	-	-	11.200.000
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	-	113.174.991.000	983.145.000	-	-	114.158.136.000
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	-	57.036.053.000	351.145.000	-	-	57.387.198.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	-	19.384.494.000	-	-	-	19.384.494.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN UMUM	-	16.020.513.000	115.620.000	-	-	16.136.133.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN ORGANISASI	-	292.860.000	100.000.000	-	-	392.860.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	BAGIAN HUKUM	-	412.421.000	47.000.000	-	-	459.421.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN PEMERINTAHAN	-	605.370.000	-	-	-	605.370.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	-	44.811.000	-	-	-	44.811.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	-	575.901.000	-	-	-	575.901.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	18.222.766.000	-	-	-	18.222.766.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	245.834.000	15.000.000	-	-	260.834.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	460.323.000	-	-	-	460.323.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	12.320.000	20.000.000	-	-	32.320.000

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0078	SMP NEGERI 5 SATU ATAP REMBANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0079	SMP NEGERI 6 SATU ATAP REMBANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2.087.097.932.00 0,00	1.585.077.591.00 0,00	145.330.915.000 ,00	2.000.000.000 ,00	412.626.926.000 ,00	2.145.035.432.00 0,00



 BUPATI PURBALINGGA

 DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 Pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA


 SETDA
 HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROPINSI JAWA TENGAH (14-358/2023)



KABUPATEN PURBALINGGA
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA NOMOR : 14 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah			
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer				
1	PELAYANAN UMUM								
1	01	1	01	Pendidikan	584.196.243.000,00	0,00	0,00	0,00	584.196.243.000,00
1	01	1	02	Kesehatan	295.570.678.000,00	8.377.945.000,00	0,00	0,00	303.948.623.000,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.287.931.000,00	0,00	0,00	0,00	11.287.931.000,00
1	01	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.184.246.000,00	0,00	0,00	0,00	4.184.246.000,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	10.384.081.000,00	0,00	0,00	0,00	10.384.081.000,00
1	01	1	06	Sosial	5.316.187.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	5.348.187.000,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	5.037.660.000,00	0,00	0,00	0,00	5.037.660.000,00
1	01	2	09	Pangan	5.151.416.000,00	0,00	0,00	0,00	5.151.416.000,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	9.883.533.000,00	0,00	0,00	0,00	9.883.533.000,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.349.004.000,00	236.000.000,00	0,00	0,00	6.585.004.000,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.401.187.000,00	0,00	0,00	0,00	8.401.187.000,00
1	01	2	15	Perhubungan	6.021.962.000,00	0,00	0,00	0,00	6.021.962.000,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	6.229.560.000,00	0,00	0,00	0,00	6.229.560.000,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.009.462.000,00	0,00	0,00	0,00	3.009.462.000,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	3.626.377.000,00	0,00	0,00	0,00	3.626.377.000,00
1	01	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	4.014.011.000,00	0,00	0,00	0,00	4.014.011.000,00
1	01	2	20	Statistik	39.568.000,00	0,00	0,00	0,00	39.568.000,00
1	01	2	24	Kearsipan	4.089.937.000,00	0,00	0,00	0,00	4.089.937.000,00
1	01	3	27	Pertanian	25.241.908.000,00	0,00	0,00	0,00	25.241.908.000,00



KABUPATEN PURBALINGGA
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	PELAYANAN UMUM					
1	01 1 01 Pendidikan	584.196.243.000,00	0,00	0,00	0,00	584.196.243.000,00
1	01 1 02 Kesehatan	295.570.678.000,00	8.377.945.000,00	0,00	0,00	303.948.623.000,00
1	01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.287.931.000,00	0,00	0,00	0,00	11.287.931.000,00
1	01 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.184.246.000,00	0,00	0,00	0,00	4.184.246.000,00
1	01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	10.384.081.000,00	0,00	0,00	0,00	10.384.081.000,00
1	01 1 06 Sosial	5.316.187.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	5.348.187.000,00
1	01 2 07 Tenaga Kerja	5.037.660.000,00	0,00	0,00	0,00	5.037.660.000,00
1	01 2 09 Pangan	5.151.416.000,00	0,00	0,00	0,00	5.151.416.000,00
1	01 2 11 Lingkungan Hidup	9.883.533.000,00	0,00	0,00	0,00	9.883.533.000,00
1	01 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.349.004.000,00	236.000.000,00	0,00	0,00	6.585.004.000,00
1	01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.401.187.000,00	0,00	0,00	0,00	8.401.187.000,00
1	01 2 15 Perhubungan	6.021.962.000,00	0,00	0,00	0,00	6.021.962.000,00
1	01 2 16 Komunikasi dan Informatika	6.229.560.000,00	0,00	0,00	0,00	6.229.560.000,00
1	01 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.009.462.000,00	0,00	0,00	0,00	3.009.462.000,00
1	01 2 18 Penanaman Modal	3.626.377.000,00	0,00	0,00	0,00	3.626.377.000,00
1	01 2 19 Kepemudaan dan Olahraga	4.014.011.000,00	0,00	0,00	0,00	4.014.011.000,00
1	01 2 20 Statistik	39.568.000,00	0,00	0,00	0,00	39.568.000,00
1	01 2 24 Kearsipan	4.089.937.000,00	0,00	0,00	0,00	4.089.937.000,00
1	01 3 27 Pertanian	25.241.908.000,00	0,00	0,00	0,00	25.241.908.000,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	01	3	31	Perindustrian	8.618.388.000,00	0,00	0,00	0,00	8.618.388.000,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	57.036.053.000,00	351.145.000,00	0,00	0,00	57.387.198.000,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	56.138.938.000,00	632.000.000,00	0,00	0,00	56.770.938.000,00
1	01	5	01	Perencanaan	12.679.563.000,00	0,00	0,00	0,00	12.679.563.000,00
1	01	5	02	Keuangan	16.813.168.000,00	21.252.000,00	2.000.000.000,00	412.626.926.000,00	431.461.346.000,00
1	01	5	03	Kepegawaian	6.954.648.000,00	0,00	0,00	0,00	6.954.648.000,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	1.021.048.000,00	0,00	0,00	0,00	1.021.048.000,00
1	01	6	01	Inspektorat	8.515.593.000,00	0,00	0,00	0,00	8.515.593.000,00
1	01	7	01	Kecamatan	51.853.638.000,00	194.030.000,00	0,00	0,00	52.047.668.000,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	37.650.130.000,00	0,00	0,00	0,00	37.650.130.000,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1.414.488.000,00	7.060.000,00	0,00	0,00	1.421.548.000,00
2	03	1	06	Sosial	162.950.000,00	0,00	0,00	0,00	162.950.000,00
3				EKONOMI					
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.105.036.000,00	38.336.756.000,00	0,00	0,00	46.441.792.000,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	1.164.265.000,00	0,00	0,00	0,00	1.164.265.000,00
3	04	2	09	Pangan	528.800.000,00	0,00	0,00	0,00	528.800.000,00
3	04	2	15	Perhubungan	14.547.882.000,00	2.238.080.000,00	0,00	0,00	16.785.962.000,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	1.454.203.000,00	508.060.000,00	0,00	0,00	1.962.263.000,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.505.239.000,00	0,00	0,00	0,00	6.505.239.000,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	794.282.000,00	52.332.000,00	0,00	0,00	846.614.000,00
3	04	2	21	Persandian	49.148.000,00	0,00	0,00	0,00	49.148.000,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	583.869.000,00	202.340.000,00	0,00	0,00	786.209.000,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	01	3	31	Perindustrian	8.618.388.000,00	0,00	0,00	0,00	8.618.388.000,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	57.036.053.000,00	351.145.000,00	0,00	0,00	57.387.198.000,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	56.138.938.000,00	632.000.000,00	0,00	0,00	56.770.938.000,00
1	01	5	01	Perencanaan	12.679.563.000,00	0,00	0,00	0,00	12.679.563.000,00
1	01	5	02	Keuangan	16.813.168.000,00	21.252.000,00	2.000.000.000,00	412.626.926.000,00	431.461.346.000,00
1	01	5	03	Kepegawaian	6.954.648.000,00	0,00	0,00	0,00	6.954.648.000,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	1.021.048.000,00	0,00	0,00	0,00	1.021.048.000,00
1	01	6	01	Inspektorat	8.515.593.000,00	0,00	0,00	0,00	8.515.593.000,00
1	01	7	01	Kecamatan	51.853.638.000,00	194.030.000,00	0,00	0,00	52.047.668.000,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	37.650.130.000,00	0,00	0,00	0,00	37.650.130.000,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1.414.488.000,00	7.060.000,00	0,00	0,00	1.421.548.000,00
2	03	1	06	Sosial	162.950.000,00	0,00	0,00	0,00	162.950.000,00
3				EKONOMI					
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.105.036.000,00	38.336.756.000,00	0,00	0,00	46.441.792.000,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	1.164.265.000,00	0,00	0,00	0,00	1.164.265.000,00
3	04	2	09	Pangan	528.800.000,00	0,00	0,00	0,00	528.800.000,00
3	04	2	15	Perhubungan	14.547.882.000,00	2.238.080.000,00	0,00	0,00	16.785.962.000,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	1.454.203.000,00	508.060.000,00	0,00	0,00	1.962.263.000,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.505.239.000,00	0,00	0,00	0,00	6.505.239.000,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	794.282.000,00	52.332.000,00	0,00	0,00	846.614.000,00
3	04	2	21	Persandian	49.148.000,00	0,00	0,00	0,00	49.148.000,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	583.869.000,00	202.340.000,00	0,00	0,00	786.209.000,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
3	04	3	27	Pertanian	17.165.157.000,00	1.379.777.000,00	0,00	0,00	18.544.934.000,00
3	04	3	30	Perdagangan	4.475.815.000,00	301.139.000,00	0,00	0,00	4.776.954.000,00
3	04	3	31	Perindustrian	701.355.000,00	4.707.000,00	0,00	0,00	706.062.000,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.876.823.000,00	0,00	0,00	0,00	12.876.823.000,00
4	05	2	10	Pertanahan	249.494.000,00	0,00	0,00	0,00	249.494.000,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	6.973.840.000,00	20.060.000,00	0,00	0,00	6.993.900.000,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.879.055.000,00	0,00	0,00	0,00	13.879.055.000,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.826.741.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	2.828.031.000,00
6				KESEHATAN					
6	07	1	02	Kesehatan	68.453.917.000,00	11.398.178.000,00	0,00	0,00	79.852.095.000,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.440.201.000,00	2.641.478.000,00	0,00	0,00	13.081.679.000,00
7				PARIWISATA					
7	08	3	26	Pariwisata	459.325.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	483.625.000,00
8				PENDIDIKAN					
8	10	1	01	Pendidikan	136.358.734.000,00	77.152.702.000,00	0,00	0,00	213.511.436.000,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	5.962.323.000,00	1.198.284.000,00	0,00	0,00	7.160.607.000,00
8	10	2	22	Kebudayaan	2.500.043.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.043.000,00
8	10	2	23	Perpustakaan	183.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	203.000.000,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	10.110.809.000,00	0,00	0,00	0,00	10.110.809.000,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	768.479.000,00	0,00	0,00	0,00	768.479.000,00
9	11	3	32	Transmigrasi	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
3	04	3	27	Pertanian	17.165.157.000,00	1.379.777.000,00	0,00	0,00	18.544.934.000,00
3	04	3	30	Perdagangan	4.475.815.000,00	301.139.000,00	0,00	0,00	4.776.954.000,00
3	04	3	31	Perindustrian	701.355.000,00	4.707.000,00	0,00	0,00	706.062.000,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.876.823.000,00	0,00	0,00	0,00	12.876.823.000,00
4	05	2	10	Pertanahan	249.494.000,00	0,00	0,00	0,00	249.494.000,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	6.973.840.000,00	20.060.000,00	0,00	0,00	6.993.900.000,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.879.055.000,00	0,00	0,00	0,00	13.879.055.000,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.826.741.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	2.828.031.000,00
6				KESEHATAN					
6	07	1	02	Kesehatan	68.453.917.000,00	11.398.178.000,00	0,00	0,00	79.852.095.000,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.440.201.000,00	2.641.478.000,00	0,00	0,00	13.081.679.000,00
7				PARIWISATA					
7	08	3	26	Pariwisata	459.325.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	483.625.000,00
8				PENDIDIKAN					
8	10	1	01	Pendidikan	136.358.734.000,00	77.152.702.000,00	0,00	0,00	213.511.436.000,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	5.962.323.000,00	1.198.284.000,00	0,00	0,00	7.160.607.000,00
8	10	2	22	Kebudayaan	2.500.043.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.043.000,00
8	10	2	23	Perpustakaan	183.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	203.000.000,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	10.110.809.000,00	0,00	0,00	0,00	10.110.809.000,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	768.479.000,00	0,00	0,00	0,00	768.479.000,00
9	11	3	32	Transmigrasi	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00

Kode	Uralan	Kelompok Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
	TOTAL	1.585.077.591.000,00	145.330.915.000,00	2.000.000.000,00	412.626.926.000,00	2.145.035.432.000,00



BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 Pada tanggal 22 Desember 2023
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA



HEBNI SULASTI
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROPINSI JAWA TENGAH (14-358/2023)



KABUPATEN PURBALINGGA
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Ruang Kelas Baru	942.904.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	73.948.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	133.203.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	63.759.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	8.831.928.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	656.905.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	565.000.000,00
Total			11.267.647.000,00
2.	Pendidikan Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	82.164.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	333.320.000,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	6.900.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	657.000.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	400.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100.752.000,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	18.130.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.848.129.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.545.196.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.528.370.000,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	29.910.000,00
Total			16.549.871.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
3.	Pendidikan Dasar	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	110.641.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	77.664.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	863.146.000,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	7.620.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.922.500.000,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	12.440.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	41.265.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.105.180.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.309.441.000,00
Total			11.449.897.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			39.267.415.000,00
B SPM Bidang Kesehatan			
1.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	33.500.000,00
Total			33.500.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	226.158.000,00
Total			226.158.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	27.000.000,00
Total			27.000.000,00
4.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.000.000,00
Total			8.000.000,00
5.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.000.000,00
Total			13.000.000,00
6.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.766.673.000,00
Total			1.766.673.000,00
7.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.000.000,00
Total			8.000.000,00
8.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.904.763.000,00
Total			1.904.763.000,00
9.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	498.574.000,00
Total			498.574.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
3.	Pendidikan Dasar	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	110.641.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	77.664.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	863.146.000,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	7.620.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.922.500.000,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	12.440.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	41.265.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.105.180.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.309.441.000,00
Total			11.449.897.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			39.267.415.000,00
B SPM Bidang Kesehatan			
1.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	33.500.000,00
Total			33.500.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	226.158.000,00
Total			226.158.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	27.000.000,00
Total			27.000.000,00
4.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.000.000,00
Total			8.000.000,00
5.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.000.000,00
Total			13.000.000,00
6.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.766.673.000,00
Total			1.766.673.000,00
7.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.000.000,00
Total			8.000.000,00
8.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.904.763.000,00
Total			1.904.763.000,00
9.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	498.574.000,00
Total			498.574.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
10.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	602.747.000,00
Total			602.747.000,00
11.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	857.919.000,00
Total			857.919.000,00
12.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.000.000,00
Total			12.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			5.958.334.000,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	24.000.000,00
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.885.955.000,00
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.969.100.000,00
Total			13.879.055.000,00
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,00
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	12.610.853.000,00
Total			12.610.853.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			26.489.908.000,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1.	Relokasi	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	4.020.000,00
Total			4.020.000,00
2.	Bencana	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	50.247.000,00
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	39.920.000,00
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000,00
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	4.020.000,00
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	2.956.000,00
Total			117.143.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			121.163.000,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	87.136.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	9.900.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
10.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	602.747.000,00
Total			602.747.000,00
11.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	857.919.000,00
Total			857.919.000,00
12.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.000.000,00
Total			12.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			5.958.334.000,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	24.000.000,00
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.885.955.000,00
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.969.100.000,00
Total			13.879.055.000,00
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,00
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	12.610.853.000,00
Total			12.610.853.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			26.489.908.000,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1.	Relokasi	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	4.020.000,00
Total			4.020.000,00
2.	Bencana	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	50.247.000,00
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	39.920.000,00
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000,00
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	4.020.000,00
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	2.956.000,00
Total			117.143.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			121.163.000,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	87.136.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	9.900.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
Total			97.036.000,00
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0,00
Total			0,00
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	18.352.000,00
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	206.000.000,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	28.000.000,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	4.814.000,00
Total			257.166.000,00
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	26.600.000,00
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8.770.000,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	62.912.000,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000,00
Total			178.282.000,00
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	13.777.000,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	45.000.000,00
Total			58.777.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			591.261.000,00
F SPM Bidang Sosial			
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.788.527.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	84.427.000,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2.000.000,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	2.000.000,00
		Pemberian Layanan Rujukan	2.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.320.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	50.000.000,00
		Penyediaan Sandang	7.960.000,00
Total			6.942.234.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
Total			97.036.000,00
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0,00
Total			0,00
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	18.352.000,00
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	206.000.000,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	28.000.000,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	4.814.000,00
Total			257.166.000,00
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	26.600.000,00
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8.770.000,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	62.912.000,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000,00
Total			178.282.000,00
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	13.777.000,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	45.000.000,00
Total			58.777.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			591.261.000,00
F SPM Bidang Sosial			
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.788.527.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	84.427.000,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2.000.000,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	2.000.000,00
		Pemberian Layanan Rujukan	2.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.000.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.320.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	50.000.000,00
		Penyediaan Sandang	7.960.000,00
Total			6.942.234.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	31.127.000,00
		Penyediaan Makanan	103.756.000,00
		Penyediaan Sandang	10.375.000,00
Total			145.258.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			7.087.492.000,00

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 Pada tanggal 22 Desember 2023
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROPINSI JAWA TENGAH (14-358/2023)

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PURBALINGGA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	584.196.243.000
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	186.081.955.000	213.400.795.000
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	407.282.000	110.641.000
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	303.948.623.000
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	96.451.659.000	73.090.142.000
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	397.696.000	1.487.962.000
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	199.291.000	465.344.000
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	713.607.000	4.808.647.000
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	11.287.931.000
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.060.689.000	5.506.504.000
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.513.446.000	13.879.055.000
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.820.000.000	-
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.442.932.000	12.610.853.000
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.493.624.000	8.007.437.000
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	25.000.000	-
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	61.146.950.000	32.831.588.000
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	148.957.000	96.263.000
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	124.000.000	265.970.000
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	4.184.246.000
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	366.250.000	126.987.000
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	921.250.000	645.434.000
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.525.000.000	1.519.348.000
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.633.600.000	536.262.000
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.000.000	-
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	10.384.081.000
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	525.938.000	825.155.000
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.009.005.000	537.616.000
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	762.377.000	58.777.000
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	5.348.187.000
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.805.400.000	894.010.000

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PURBALINGGA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	584.196.243.000
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	186.081.955.000	213.400.795.000
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	407.282.000	110.641.000
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	303.948.623.000
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	96.451.659.000	73.090.142.000
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	397.696.000	1.487.962.000
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	199.291.000	465.344.000
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	713.607.000	4.808.647.000
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	11.287.931.000
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.060.689.000	5.506.504.000
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.513.446.000	13.879.055.000
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.820.000.000	-
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.442.932.000	12.610.853.000
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.493.624.000	8.007.437.000
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	25.000.000	-
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	61.146.950.000	32.831.588.000
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	148.957.000	96.263.000
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	124.000.000	265.970.000
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	4.184.246.000
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	366.250.000	126.987.000
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	921.250.000	645.434.000
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.525.000.000	1.519.348.000
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.633.600.000	536.262.000
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.000.000	-
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	10.384.081.000
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	525.938.000	825.155.000
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.009.005.000	537.616.000
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	762.377.000	58.777.000
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	5.348.187.000
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.805.400.000	894.010.000

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	APBD (Rp)
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	708.000.000	2.244.758.000
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	386.585.000	162.950.000
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	120.000.000	29.807.000
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	5.037.660.000
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	25.000.000	8.000.000
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	218.600.000	498.265.000
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	525.000.000	620.000.000
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	57.250.000	38.000.000
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	406.735.000	408.073.000
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	171.384.000	38.463.000
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	23.000.000	4.316.000
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	87.607.000	137.850.000
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	300.390.000	179.777.000
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	5.151.416.000
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	1.600.000
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	189.402.000	44.000.000
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	743.525.000	468.000.000
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	80.000.000	15.200.000
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	10.000.000	5.108.000
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	500.000.000	88.036.000
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	156.350.000
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	9.883.533.000
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	20.000.000	146.562.000
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.512.000.000	236.315.000
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.956.881.000	878.943.000
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	14.129.000	19.931.000
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	56.979.000	18.919.000
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	15.699.000	20.541.000
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	27.812.000	20.541.000
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25.105.000	10.419.000
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.374.830.000	5.641.729.000
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	5.082.393.000
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.395.970.000	1.139.385.000
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	257.500.000	89.112.000
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	517.500.000	274.114.000
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	77.000.000	-
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	3.332.915.000
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.000.000	15.604.000
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	55.612.000
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	681.766.000	613.522.000
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.198.077.000	4.383.534.000

KODE		URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	APBD (Rp)
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	161.900.000	440.919.000
2	14	03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.477.369.000	7.472.104.000
2	14	04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	419.917.000	5.168.656.000
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2	15	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	6.021.962.000
2	15	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.260.890.000	16.785.962.000
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	6.229.560.000
2	16	02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	685.277.000
2	16	03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	1.276.986.000
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2	17	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	3.009.462.000
2	17	03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	38.500.000	80.000.000
2	17	04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	63.750.000	21.580.000
2	17	05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	470.554.000	183.800.000
2	17	06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	316.017.000	98.265.000
2	17	07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	581.000.000	1.829.945.000
2	17	08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.690.000.000	4.291.649.000
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	18	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	3.626.377.000
2	18	02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	38.100.000	30.480.000
2	18	03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	54.021.000	39.596.000
2	18	04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	50.790.000	140.596.000
2	18	05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	432.452.000	623.022.000
2	18	06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	17.850.000	12.920.000
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	4.014.011.000
2	19	02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.013.404.000	971.550.000
2	19	03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.459.960.000	5.839.057.000
2	19	04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	350.000.000	350.000.000
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2	20	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	26.391.000	39.568.000
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2	21	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	48.000.000	49.148.000
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2	22	02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	328.525.000	1.578.403.000
2	22	04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	45.972.000	29.555.000
2	22	05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	282.771.000	152.548.000
2	22	06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	697.676.000	739.537.000
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2	23	02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	912.161.000	178.000.000
2	23	03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	25.000.000	25.000.000
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2	24	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	4.007.501.000
2	24	02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	81.142.000	48.436.000
2	24	03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	42.500.000	34.000.000
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	55.000.000	28.200.000
3	25	04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	117.000.000	711.265.000

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	APBD (Rp)
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	57.000.000	46.744.000
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	442.000.000	282.325.000
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	286.476.000	117.000.000
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	72.950.000	84.300.000
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	25.241.908.000
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.071.550.000	7.068.401.000
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.643.900.000	6.173.646.000
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	243.334.000	648.436.000
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	409.525.000	279.692.000
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.754.351.000	4.374.759.000
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	40.000.000	9.992.000
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.864.940.000	3.869.543.000
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	399.875.000	567.047.000
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	324.100.000	39.960.000
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	217.875.000	290.412.000
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	8.618.388.000
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	819.000.000	698.062.000
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	4.000.000
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	9.440.000	4.000.000
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	50.000.000	11.200.000
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	36.728.252.000
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.078.136.000	19.287.557.000
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.227.050.000	1.371.389.000
4	02		SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	38.556.459.000
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.586.554.000	18.214.479.000
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	01		PERENCANAAN		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	5.169.412.000
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.251.331.000	591.791.000
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	558.080.000	6.918.360.000
5	02		KEUANGAN		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	13.872.878.000
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	390.665.508.000	415.503.349.000
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.328.457.000	625.676.000
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	206.657.000	1.459.443.000
5	03		KEPEGAWAIAN		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	5.689.863.000
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.619.020.000	1.264.785.000
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	825.000.000	55.000.000
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	169.575.000	1.021.048.000
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	APBD (Rp)
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	7.795.593.000
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	673.632.000	650.000.000
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	239.934.000	70.000.000
7			UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01		KECAMATAN		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	42.924.031.000
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	725.743.000	2.247.349.000
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.672.334.000	5.856.884.000
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.114.855.000	569.829.000
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	771.061.000	396.238.000
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	180.000.000	53.337.000
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.828.527.113.000	2.485.787.000
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	151.534.000	642.195.000
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	39.962.109.000	32.197.312.000
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	602.000.000	839.060.000
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	320.000.000	182.120.000
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.186.820.000	1.303.656.000

r



BUPATI PURBALINGGA

SYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga

Pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA,

HERMI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14

NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH (14-358/2023)



LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2024

KABUPATEN PURBALINGGA
 SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM
 PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2024

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.009.462.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.626.377.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERTANIAN	25.241.908.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.618.388.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	80.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	21.580.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	183.800.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	111.625.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.816.585.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.291.649.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	30.480.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	39.596.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	140.596.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	623.022.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.920.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	28.200.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	711.265.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	46.744.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	282.325.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	117.000.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	84.300.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	7.068.401.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	6.173.646.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERTANIAN	648.436.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	279.692.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	4.374.759.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.992.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.869.543.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	567.047.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	39.960.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	290.412.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	698.062.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdaya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.000.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS TENAGA KERJA	5.037.660.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	5.151.416.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	8.000.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	498.265.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	620.000.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TENAGA KERJA	38.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1.600.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	44.000.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	468.000.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	15.200.000
Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA	11.200.000
Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERHUBUNGAN	6.021.962.000
Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN	16.785.962.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	13.879.055.000
Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	12.610.853.000
Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	4.184.246.000
Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	126.987.000
Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	645.434.000
Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.519.348.000
Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	536.262.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	5.108.000
Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	88.036.000
Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	156.350.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.348.187.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	894.010.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.942.234.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.244.758.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	162.950.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	29.807.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	179.777.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	28.319.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.199.276.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.161.156.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	584.196.243.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN	303.948.623.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	4.014.011.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	213.400.795.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	110.641.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	73.090.142.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	1.487.962.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN	465.344.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	4.808.647.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	408.073.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	38.463.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.316.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	137.850.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	412.600.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.272.828.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.500.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	971.550.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	5.839.057.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	350.000.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	178.000.000
Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	25.000.000
Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.578.403.000
Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29.555.000
Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	152.548.000
Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	739.537.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	18.197.246.000
Prioritas 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.287.931.000
Prioritas 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.506.504.000
Prioritas 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.007.437.000
Prioritas 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	32.831.588.000
Prioritas 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	96.263.000
Prioritas 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	265.970.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.069.643.000
Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	537.616.000
Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.883.533.000
Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	146.562.000
Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	236.315.000
Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	878.943.000
Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19.931.000
Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.919.000
Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.541.000
Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.541.000
Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.419.000
Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.641.729.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.314.438.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.082.393.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.332.915.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.007.501.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.229.560.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DAERAH	36.728.252.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.169.412.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KEUANGAN DAERAH	13.872.878.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	5.689.863.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT DAERAH	7.787.593.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KEMANGKON	1.351.364.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN BUKATEJA	1.557.359.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KEJOBONG	1.553.313.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KALIGONDANG	1.877.801.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PURBALINGGA	11.487.835.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KALIMANAH	4.030.818.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KUTASARI	1.691.282.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN MREBET	1.827.374.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN BOBOTSARI	1.527.841.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KARANGREJA	1.704.052.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KARANGANYAR	1.492.461.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KARANGMONCOL	1.687.963.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN REMBANG	1.796.476.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN BOJONGSARI	1.722.363.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PADAMARA	2.529.332.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PENGADEGAN	1.990.132.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KARANGJAMBU	1.637.286.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KERTANEGARA	1.458.979.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.485.787.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	825.155.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT DPRD	38.556.459.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	58.777.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.139.385.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	89.112.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	274.114.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.604.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	55.612.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	613.522.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.383.534.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	685.277.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.276.986.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39.568.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	49.148.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	48.436.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	34.000.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	1.090.311.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	1.371.389.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD	18.214.479.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	591.791.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.918.360.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	415.503.349.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	625.676.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.459.443.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1.264.785.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	55.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.021.048.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	658.000.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT DAERAH	70.000.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KEMANGKON	140.330.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN BUKATEJA	127.650.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KEJOBONG	117.885.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KALIGONDANG	134.370.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PURBALINGGA	132.951.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KALIMANAH	125.822.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KUTASARI	124.151.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN MREBET	139.484.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN BOBOTSARI	156.430.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KARANGREJA	105.490.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KARANGANYAR	113.305.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KARANGMONCOL	123.940.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN REMBANG	125.977.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN BOJONGSARI	123.800.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PADAMARA	136.950.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PENGADEGAN	108.033.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KARANGJAMBU	101.371.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN KERTANEGARA	109.410.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KEMANGKON	88.984.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN BUKATEJA	65.575.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KEJOBONG	82.083.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KALIGONDANG	92.141.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PURBALINGGA	3.315.838.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KALIMANAH	942.560.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KUTASARI	75.300.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN MREBET	103.748.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN BOBOTSARI	73.590.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KARANGREJA	51.645.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KARANGANYAR	89.058.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KARANGMONCOL	72.920.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN REMBANG	82.344.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN BOJONGSARI	61.880.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PADAMARA	466.300.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PENGADEGAN	67.042.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KARANGJAMBU	53.000.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN KERTANEGARA	72.876.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KEMANGKON	28.200.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN BUKATEJA	29.000.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KEJOBONG	24.760.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KALIGONDANG	22.106.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN PURBALINGGA	28.073.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KALIMANAH	41.000.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KUTASARI	25.700.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN MREBET	25.618.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN BOBOTSARI	101.200.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KARANGREJA	28.000.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR	26.700.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KARANGMONCOL	21.760.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN REMBANG	27.840.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN BOJONGSARI	28.480.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN PADAMARA	29.200.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN PENGADEGAN	27.732.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KARANGJAMBU	28.760.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN KERTANEGARA	25.700.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KEMANGKON	16.311.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN BUKATEJA	30.703.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KEJOBONG	24.600.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KALIGONDANG	21.892.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN PURBALINGGA	29.185.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KALIMANAH	18.000.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KUTASARI	21.000.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN MREBET	19.272.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN BOBOTSARI	10.000.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KARANGREJA	28.285.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KARANGANYAR	24.975.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KARANGMONCOL	23.840.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN REMBANG	21.136.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN BOJONGSARI	19.680.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN PADAMARA	25.000.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN PENGADEGAN	11.815.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KARANGJAMBU	25.784.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN KERTANEGARA	24.760.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN KEMANGKON	10.271.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN KALIGONDANG	9.860.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN PURBALINGGA	400.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN MREBET	6.856.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN BOBOTSARI	5.000.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN KARANGANYAR	750.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN BOJONGSARI	8.720.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN PADAMARA	1.880.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN PENGADEGAN	9.600.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	642.195.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32.197.312.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	839.060.000
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	182.120.000

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM	SKPD	JUMLAH
Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.303.656.000
JUMLAH TOTAL				2.145.035.432.000



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Desember 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14
NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH (14-358/2023)

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NO 14 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PURBALINGGA
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PERJABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PNS

GOLONGAN RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	FUNGSIONAL	STAFF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	2	-	2
Golongan IV/d	-	1	-	-	2	-	3
Golongan IV/c	-	27	4	-	21	-	52
Golongan IV/b	-	3	36	-	188	1	228
Golongan IV/a	-	-	68	24	830	5	927
JUMLAH GOLONGAN IV	-	31	108	24	1.043	6	1.212
Golongan III/d	-	-	31	229	954	62	1.276
Golongan III/c	-	-	2	105	819	69	995
Golongan III/b	-	-	-	58	629	246	933
Golongan III/a	-	-	-	7	931	240	1.178
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	33	399	3.333	617	4.382
Golongan II/d	-	-	-	-	96	246	342
Golongan II/c	-	-	-	-	22	216	238
Golongan II/b	-	-	-	-	9	59	68
Golongan II/a	-	-	-	-	-	46	46
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	127	567	694
Golongan I/d	-	-	-	-	-	35	35
Golongan I/c	-	-	-	-	-	5	5
Golongan I/b	-	-	-	-	-	2	2
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	42	42
TOTAL	-	31	141	423	4.503	1.232	6.330

PPPK

GOLONGAN RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	FUNGSIONAL	STAFF	
10	-	-	-	-	14	-	14
09	-	-	-	-	1.884	-	1.884
07	-	-	-	-	116	-	116
05	-	-	-	-	19	-	19
SUB JUMLAH	-	-	-	-	2.033	-	2.033

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROPINSI JAWA TENGAH (14-358/2023)

KABUPATEN PURBALINGGA
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN N-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N-1	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN TAHUN N-1
1	Piutang Pajak Daerah		2.987.704.763,00	3.475.463.440	2.987.704.763	3.475.463.440
	Piutang Pajak Reklame		87.725.599,00	75.813.440	87.725.599,00	75.813.440
	Piutang Pajak Penerangan Jalan		2.314.571.920,00	2.548.800.000	2.314.571.920,00	2.548.800.000
	Piutang Pajak Air Tanah		84.286.639,00	70.850.000	84.286.639,00	70.850.000
	Piutang PBB-P2		501.120.605,00	780.000.000	501.120.605,00	780.000.000
2	Piutang Retribusi		3.357.111.006,00	2.508.720.140	2.657.394.264	2.508.720.140
	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		164.016.000,00	108.000.000	164.016.000,00	108.000.000
	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		402.819.180,00	360.000.000	402.819.180,00	360.000.000
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		837.354.084,00	598.904.320	837.354.084,00	598.904.320
	Piutang Retribusi Terminal		1.440.000,00	1.815.820	1.440.000,00	1.815.820
	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir		1.251.765.000,00	1.440.000.000	1.251.765.000,00	1.440.000.000
	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		49.081.700,00	49.081.700	49.081.700,00	49.081.700
	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung		650.635.042,00	1.386.000.000	650.635.042,00	1.386.000.000
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		19.834.931.785,34	21.078.285.557	9.561.049.114	21.078.285.557
	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan		0,00	-	0,00	-
	Piutang Jasa Giro		885.944,02	880.000	885.944,02	880.000
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		147.750.911,32	140.750.000	147.750.911,32	140.750.000
	Piutang BLUD		19.686.294.930,00	21.393.630.500	19.686.294.930,00	21.393.630.500
4	Piutang Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah		1.832.816.292,00	2.150.824.000,00	0,00	3.983.640.292,00
	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		963.821.559,00	1.086.442.000,00		2.050.263.559
	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		538.229.909,00	655.451.000,00		1.193.680.909
	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		309.324.119,00	376.699.000,00		686.023.119
	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan		21.440.705,00	32.232.000,00		53.672.705



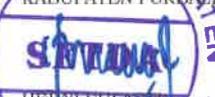
Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
SKTDA
HERNI SULASTI

KABUPATEN PURBALINGGA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	KET
1	1985	PD BPR BKK Purbalingga	PERDA No 5 Th 2019		27.332.000.000	13.690.000.000		13.690.000.000		3.162.068.000	-	13.690.000.000	
2	1991	PD BPR Artha Perwira	PERDA No 5 Th 2019		30.000.000.000	11.912.500.000	1.062.500.000	12.975.000.000		3.284.970.000	-	12.975.000.000	Untuk Program Micro Finance Hibah Up Land
3	2003	PT BPRS Buana Mitra Perwira	PERDA No 5 Th 2019		62.303.000.000	6.270.000.000		6.270.000.000		1.923.478.000	-	6.270.000.000	
4	1985	PD BKK Karangmoncol	PERDA No 5 Th 2019		6.344.402.000	2.540.000.000		2.540.000.000			-	2.540.000.000	
5	2004	PD Purbalingga Ventura				1.131.302.634		1.131.302.634			-	1.131.302.634	
6	2005	Perumda OWABONG	PERDA No 5 Th 2019		99.000.000.000	70.752.770.800		70.752.770.800		1.300.000.000	-	70.752.770.800	
7	1968	Perumda Air Minum Tirta Perwira	PERDA No 5 Th 2019		75.512.050.151	88.679.476.151		88.679.476.151		4.455.627.000	-	88.679.476.151	
8	2004	Perumda Puspahastama				4.580.000.000		4.580.000.000		82.500.000	-	4.580.000.000	
9	1999	PT Bank BPD Jawa Tengah	PERDA No 5 Th 2019		34.605.000.000	36.605.000.000		36.605.000.000		8.000.000.000	-	36.605.000.000	
10	1995	PT PRPP JATENG				120.800.000		120.800.000			-	120.800.000	
Jumlah						236.281.849.585	1.062.500.000	237.344.349.585		22.208.648.000	-	237.344.349.585	

KABUPATEN PURBALINGGA
WALUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Ditandatangani di Purbalingga
Pada tanggal 2 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERI SULASTRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14
NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROPINSI JAWA TENGAH (14-358/2023)

LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NO 14 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PURBALINGGA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA ASET	JENIS ASET	SALDO PADA AKHIR TAHUN T -2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN T- 1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN T- 1	PERKIRAAN SALDO TAHUN T-1
1	Tuntutan Perbendaharaan	Tuntutan Perbendaharaan	25.638.189,00	-	0	25.638.189,00
2	Aset Tidak Berwujud	Aset Tidak Berwujud	2.360.769.240,00	779.236.343,75	1.550.979.423,93	1.589.026.159,82
3	Aset Lain-lain	Aset Lain-lain	15.476.110.500,46	4.549.626.034,12	7.738.055.250,23	12.287.681.284,35
			17.862.517.929,46	5.328.862.377,87	9.289.034.674,16	13.902.345.633,17

BURAH PURBALINGGA

BURAH PURBALINGGA
BURAH PURBALINGGA

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROPINSI JAWA TENGAH (14-358/2023)

LAMPIRAN XIV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 NO 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PURBALINGGA
 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun ini (Rp)	
				APBD TA T-1	PERUBAHAN APBD TA T-1		APBD TA T	PERUBAHAN APBD TA T
1	NIHIL							

BUPATI PURBALINGGA

 HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 Pada tanggal 22 Desember 2023
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA


 HERNI SULASTI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROPINSI JAWA TENGAH (14-358/2023)

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NO 14 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PURBALINGGA
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tujuan Pembentukan dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
1	Pembiayaan Pemilu Kepala Daerah Serentak 2024		6.000.000.000	6.000.000.000	-	6.000.000.000	-


BUPATI PURBALINGGA
[Signature]
BUPATI HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


[Signature]
HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROPINSI JAWA TENGAH (14-358/2023)

LAMPIRAN XVI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 NO 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PURBALINGGA
 DAFTAR DANA PINJAMAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sumber Pinjaman/Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp.)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	NIHIL										



BUPATI PURBALINGGA

DIYAN HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 Pada tanggal 22 Desember 2023
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan								31.746.364.000
		MP 1: Industri 4.0 di 7 Subsektor Prioritas	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 2: Destinasi Pariwisata Prioritas							483.625.000
			3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan daya Tarik wisata yang dikembangkan	20,59 persen				282.325.000
						3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan daya tarik wisata yang dikembangkan	20,59 persen	14.400.000
						3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek wisata yang dipelihara	2 obyek	235.925.000
						3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan TDUP yang difasilitasi	25 dokumen	32.000.000
			3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Daya Tarik Wisata Yang meningkat angka kunjungan wisatanya	66,18 persen				117.000.000
						3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan daya tarik wisata yang meningkat angka junjungan wisatanya	66,16 persen	117.000.000
			3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	131 orang				84.300.000
						3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif bersertifikat	131 persen	84.300.000
		MP 3: Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	Tidak ada dukungan langsung						

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 SINKRONISASI MAJOR PROJECT DENGAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan								31.746.364.000
		MP 1: Industri 4.0 di 7 Subsektor Prioritas	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 2: Destinasi Pariwisata Prioritas							483.625.000
			3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan daya Tarik wisata yang dikembangkan	20,59 persen				282.325.000
						3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan daya tarik wisata yang dikembangkan	20,59 persen	14.400.000
						3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek wisata yang dipelihara	2 obyek	235.925.000
						3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan TDUP yang difasilitasi	25 dokumen	32.000.000
			3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Daya Tarik Wisata Yang meningkat angka kunjungan wisatanya	66,18 persen				117.000.000
						3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan daya tarik wisata yang meningkat angka junjungan wisatanya	66,16 persen	117.000.000
			3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	131 orang				84.300.000
						3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif bersertifikat	131 persen	84.300.000
		MP 3: Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	Tidak ada dukungan langsung						

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
		MP 4: Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan							6.639.077.000
			3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata rata prosentase ketersediaan sarana pertanian (traktor, pompa air, combine harvester, power thresher, benih padi)	41 persen				309.100.000
						3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan IB	90,63 persen	309.100.000
							Prosentase penggunaan bibit unggul (padi)	15,28 persen	
						3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase benih padi yang diedarkan UPTD	100 persen	-
			3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luasan lahan pertanian yang diolah/dimanfaatkan	100 persen				1.027.090.000
						3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana BPP sesuai standar	52,53 persen	875.876.000
							Pengelolaan BPP	12 bulan	
						3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengembangan agribisnis pertanian pada dataran tinggi	22 desa	151.214.000
			3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prevalensi penyakit hewan	19,30 persen				648.436.000
				Persentase daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	84 persen	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang mendapatkan pelayanan pengobatan massal	4.676 ekor	36.168.000
						3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi penyakit hewan menular strategis (PHMS)	20,52 persen	586.075.000
						3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya pemantauan/ pemeriksaan PAH	12 bulan	26.193.000
			3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanggulangan bencana pertanian	64 persen				279.692.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
						3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan pertanian yang mendapat fasilitasi penanggulangan bencana	275 ha	279.692.000
			3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani terbina (katagori madya dan utama)	12,69 persen				4.374.759.000
						3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan	1.534 kelompok	4.374.759.000
		MP 5: Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 6: Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 7: Integrasi Pelabuhan Perikanan dan fish Market Bertaraf Internasional	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 8: Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)							17.412.361.000
			1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	48 persen				5.506.504.000
						1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase bangunan pengairan dalam kondisi baik	47 persen	5.506.504.000
			3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata rata prosentase ketersediaan sarana pertanian (traktor, pompa air, combine harvester, power thresher, benih padi)	41 persen				6.759.301.000
						3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase sarana pertanian dan peternakan yang dimanfaatkan	75 persen	6.343.001.000
						3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase benih padi yang diedarkan UPTD	100 persen	416.300.000
			3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luasan lahan pertanian yang diolah/dimanfaatkan	100 persen				5.146.556.000
						3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi pengembangan prasarana pertanian	12 bulan	391.257.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
						3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Penambahan luasan oncoran lahan pertanian	700 ha	4.755.299.000
		MP 9: Pengelolaan Terpadu UMKM							7.211.301.000
			2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	75,9 persen				80.000.000
						2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	73,5 persen	80.000.000
			2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sudah menerapkan standar SAK	76,3 persen				21.580.000
						2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang sudah menerapkan standar SAK	187 KSP/USP	21.580.000
			2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian	60 persen				183.800.000
						2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikat	160 orang	183.800.000
			2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan volume usaha koperasi	12 persen				98.265.000
						2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melakukan inovasi	40 koperasi	98.265.000
			2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin	2,5 persen				1.829.945.000
						2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang dibina	97.180 Pelaku UMKM	1.829.945.000
			2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	4,42 persen				4.291.649.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
						2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pertambahan jumlah UMKM baru	2.420 Pelaku UMKM	4.291.649.000
			3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat	275 unit				698.062.000
						3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	100 persen	698.062.000
			3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase usulan ijin usaha industri yang mendapat rekomendasi	87,5 persen				4.000.000
						3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase izin usaha industri yang mendapat rekomendasi	85 persen	4.000.000
			3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	200 unit				4.000.000
						3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	Pendataan Industri di Kab. Purbalingga	12 bulan	4.000.000
2	Pprioritas 2 Mengembangkan Wilayah Untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	MP 10: Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 11: Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 12: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 13: Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Soffi, dan Sorong	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 14: Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 15: Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 16: PKS N Kawasan Perbatasan Negara	Tidak ada dukungan langsung						

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;								271.642.097.000
		MP 18: Percepatan Penurunan Kematian Ibm dan Stunting							17.658.823.000
			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi stunting (data EPPGM)	14 persen				11.856.512.000
						1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Puskesmas dan RS thd jumlah penduduk	3.3 /100.000	5.008.000.000
						1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara	100 persen	6.848.512.000
			1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/kelurahan Sehat Mandiri	28,03 persen				56.000.000
						1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan penyuluhan melalui media promosi	100 persen	-
						1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan RT yang ber PHBS	88 persen	56.000.000
			2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	9,39 persen				601.611.000
						2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke wilayah	100 persen	30.861.000
						2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100 persen	570.750.000
			2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS	10,37 persen				5.144.700.000
						2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga sejahtera	293 KK	300.000.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
				Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL ber-KB	85,41 persen	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100 persen	4.844.700.000
		MP 19: Pembangunan Iscience Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 20: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0							213.511.436.000
			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						213.400.795.000
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	99,8 persen	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SD	63 persen	114.079.333.000
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	96,27 persen	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	63 persen	68.434.920.000
				APM PAUD	80 persen	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	51 persen	25.521.003.000
				Persentase PKBM yang terakreditasi	77,78 persen	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (pkbm) terakreditasi	51 persen	5.365.539.000
			1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						110.641.000
				Persentase SD dan SMP dengan rasio guru : murid lebih dari 20	12,5 persen	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan PTK bersertifikat	81,1 persen	110.641.000
		MP 21: Reformasi Sistem Perlindungan Sosial							10.243.952.000
			1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	59,55 persen				894.010.000
						1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PSKS yang dibina	100 persen	894.010.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	45,36 persen				6.942.234.000
						1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 persen	6.942.234.000
			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial	87,69 persen				2.244.758.000
						1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan rumah tangga tervalidasi	100 persen	2.244.758.000
			1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	95,99 persen				162.950.000
						1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan kampung siaga	100 persen	145.258.000
						1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan korban bencana menerima bantuan	100 persen	17.692.000
		MP 22: Reformasi Sistem Kesehatan Nasional							30.227.886.000
			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka morbiditas	18,1 persen				30.227.886.000
						1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Puskesmas dan RS thd jumlah penduduk	3.3 /100.000	7.296.009.000
						1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara	100 persen	22.931.877.000
4	Prioritas 4 revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan	Tidak Memiliki Mayor Project Khusus							

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	Prioritas 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;								28.984.913.000
		MP 23: Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 24: Kereta Api Makassar-Parepare	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 25: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 26: Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 27: Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 28: Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 29: Transformasi Digital							1.962.263.000
			2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memiliki Website aktif	80 persen				685.277.000
						2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi pemda	100 persen	685.277.000
			2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi informatika	85 persen				1.276.986.000
						2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah website dan sub domain OPD yang terpelihara	55 OPD	1.255.478.000
						2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi (Layanan pemerintah berbasis elektronik)	5 aplikasi	21.508.000
		MP 30: Pengamanan Pesisir S Perkotaan Pantura Jawa	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 31:18 Waduk Multiguna	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 32: Jembatan Udara 37 Rute di Papua	Tidak ada dukungan langsung						

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
		MP 4: Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan							6.639.077.000
			3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata rata prosentase ketersediaan sarana pertanian (traktor, pompa air, combine harvester, power thresher, benih padi)	41 persen				309.100.000
						3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan IB	90,63 persen	309.100.000
							Prosentase penggunaan bibit unggul (padi)	15,28 persen	
						3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase benih padi yang diedarkan UPTD	100 persen	-
			3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luasan lahan pertanian yang diolah/dimanfaatkan	100 persen				1.027.090.000
						3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana BPP sesuai standar	52,53 persen	875.876.000
							Pengelolaan BPP	12 bulan	
						3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengembangan agribisnis pertanian pada dataran tinggi	22 desa	151.214.000
			3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prevalensi penyakit hewan	19,30 persen				648.436.000
				Persentase daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	84 persen	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang mendapatkan pelayanan pengobatan massal	4.676 ekor	36.168.000
						3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi penyakit hewan menular strategis (PHMS)	20,52 persen	586.075.000
						3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya pemantauan/pemeriksaan PAH	12 bulan	26.193.000
			3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanggulangan bencana pertanian	64 persen				279.692.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
						3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan pertanian yang mendapat fasilitasi penanggulangan bencana	275 ha	279.692.000
			3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani terbina (katagori madya dan utama)	12,69 persen				4.374.759.000
						3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan	1.534 kelompok	4.374.759.000
		MP 5: Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 6: Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 7: Integrasi Pelabuhan Perikanan dan fish Market Bertaraf Internasional	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 8: Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)							17.412.361.000
			1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	48 persen				5.506.504.000
						1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase bangunan pengairan dalam kondisi baik	47 persen	5.506.504.000
			3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata rata prosentase ketersediaan sarana pertanian (traktor, pompa air, combine harvester, power thresher, benih padi)	41 persen				6.759.301.000
						3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase sarana pertanian dan peternakan yang dimanfaatkan	75 persen	6.343.001.000
						3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Temak, dan Hijauan Pakan Temak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase benih padi yang diedarkan UPTD	100 persen	416.300.000
			3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luasan lahan pertanian yang diolah/dimanfaatkan	100 persen				5.146.556.000
						3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi pengembangan prasarana pertanian	12 bulan	391.257.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
						3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Penambahan luasan oncoran lahan pertanian	700 ha	4.755.299.000
		MP 9: Pengelolaan Terpadu UMKM							7.211.301.000
			2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	75,9 persen				80.000.000
						2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	73,5 persen	80.000.000
			2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sudah menerapkan standar SAK	76,3 persen				21.580.000
						2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang sudah menerapkan standar SAK	187 KSP/USP	21.580.000
			2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian	60 persen				183.800.000
						2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikat	160 orang	183.800.000
			2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan volume usaha koperasi	12 persen				98.265.000
						2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melakukan inovasi	40 koperasi	98.265.000
			2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin	2,5 persen				1.829.945.000
						2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang dibina	97.180 Pelaku UMKM	1.829.945.000
			2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	4,42 persen				4.291.649.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
						2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pertambahan jumlah UMKM baru	2.420 Pelaku UMKM	4.291.649.000
			3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat	275 unit				698.062.000
						3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	100 persen	698.062.000
			3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase usulan ijin usaha industri yang mendapat rekomendasi	87,5 persen				4.000.000
						3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase izin usaha industri yang mendapat rekomendasi	85 persen	4.000.000
			3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	200 unit				4.000.000
						3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	Pendataan Industri di Kab. Purbalingga	12 bulan	4.000.000
2	Pprioritas 2 Mengembangkan Wilayah Untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	MP 10: Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 11: Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 12: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 13: Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Soffi, dan Sorong	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 14: Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 15: Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 16: PKSN Kawasan Perbatasan Negara	Tidak ada dukungan langsung						

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;								271.642.097.000
		MP 18: Percepatan Penurunan Kematian Ikn dan Stunting							17.658.823.000
			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi stunting (data EPPGM)	14 persen				11.856.512.000
						1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Puskesmas dan RS thd jumlah penduduk	3.3 /100.000	5.008.000.000
						1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara	100 persen	6.848.512.000
			1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/kelurahan Sehat Mandiri	28,03 persen				56.000.000
						1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan penyuluhan melalui media promosi	100 persen	-
						1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan RT yang ber PHBS	88 persen	56.000.000
			2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	9,39 persen				601.611.000
						2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke wilayah	100 persen	30.861.000
						2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100 persen	570.750.000
			2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS	10,37 persen				5.144.700.000
						2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga sejahtera	293 KK	300.000.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
				Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL ber-KB	85,41 persen	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100 persen	4.844.700.000
		MP 19: Pembangunan Iscience Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 20: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0							213.511.436.000
			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						213.400.795.000
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	99,8 persen	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SD	63 persen	114.079.333.000
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	96,27 persen	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	63 persen	68.434.920.000
				APM PAUD	80 persen	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	51 persen	25.521.003.000
				Persentase PKBM yang terakreditasi	77,78 persen	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (pkbm) terakreditasi	51 persen	5.365.539.000
			1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						110.641.000
				Persentase SD dan SMP dengan rasio guru : murid lebih dari 20	12,5 persen	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan PTK bersertifikat	81,1 persen	110.641.000
		MP 21: Reformasi Sistem Perlindungan Sosial							10.243.952.000
			1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	59,55 persen				894.010.000
						1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PSKS yang dibina	100 persen	894.010.000

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	45,36 persen				6.942.234.000
						1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 persen	6.942.234.000
			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial	87,69 persen				2.244.758.000
						1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan rumah tangga tervalidasi	100 persen	2.244.758.000
			1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	95,99 persen				162.950.000
						1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan kampung siaga	100 persen	145.258.000
						1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan korban bencana menerima bantuan	100 persen	17.692.000
		MP 22: Reformasi Sistem Kesehatan Nasional							30.227.886.000
			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka morbiditas	18,1 persen				30.227.886.000
						1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Puskesmas dan RS thd jumlah penduduk	3.3 /100.000	7.296.009.000
						1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara	100 persen	22.931.877.000
4	Prioritas 4 revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan	Tidak Memiliki Mayor Project Khusus							

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	Prioritas 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;								28.984.913.000
		MP 23: Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 24: Kereta Api Makassar-Parepare	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 25: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 26: Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 27: Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 28: Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 29: Transformasi Digital							1.962.263.000
			2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memiliki Website aktif	80 persen				685.277.000
						2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi pemda	100 persen	685.277.000
			2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi informatika	85 persen				1.276.986.000
						2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah website dan sub domain OPD yang terpelihara	55 OPD	1.255.478.000
						2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi (Layanan pemerintah berbasis elektronik)	5 aplikasi	21.508.000
		MP 30: Pengamanan Pesisir S Perkotaan Pantura Jawa	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 31:18 Waduk Multiguna	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 32: Jembatan Udara 37 Rute di Papua	Tidak ada dukungan langsung						

NO	PRIORITAS NASIONAL	MAYOR PROYEK	PROGRAM	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
			2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	79,58 persen				19.931.000
						2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Cakupan Industri Yang memiliki TPS B3	80 persen	19.931.000
		MP 42: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana							537.616.000
			1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan kebencanaan	54 persen				537.616.000
						1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kab / Kota (per jenis bencana)	4.000 orang	87.136.000
						1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kab / Kota	100 persen	272.198.000
						1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pertolongan dan evakuasi korban bencana Kab / Kota	100 persen	178.282.000
	Prioritas 7 Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik	MP 43: Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	Tidak ada dukungan langsung						
		MP 44: Penguatan Keamanan Laut di Natuna	Tidak ada dukungan langsung						
	Grand Total								332.930.921.000



BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 Pada tanggal 22 Desember 2023
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 14
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROPINSI JAWA TENGAH (14-358/2023)